

K.1. KONDISI UMUM

K.1.1. Data Administratif

No.	Keterangan
1.	Nama Kabupaten/Kota :
2.	Luas Wilayah : Ha
3.	Luas Wilayah Permukiman : Ha
4.	Persentase Luas Wilayah Permukiman terhadap Luas Wilayah : %
5.	Jumlah Penduduk : Jiwa
6.	Jumlah Rumah Tangga : RT
7.	Besaran PDRB Daerah Tahun 2009 : Rp.
8.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2009 :

K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk

No.	Keterangan
1.	Mata pencaharian utama penduduk (Misal: nelayan, petani, buruh, swasta, dan lain-lain):
	a) = %
	b) = %
	c) dst = %
	Jumlah = 100 %
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) : Rp.
3.	Rata-rata penghasilan Rumah Tangga : Rp.
4.	Jumlah Rumah Tangga berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:
	a) Kurang dari Rp. 1.000.000,- = RT
	b) Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.700.000,- = RT
	c) Rp. 1.700.001,- s/d Rp. 2.500.000,- = RT
	d) Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.500.000,- = RT
	e) Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,- = RT
	f) Lebih dari Rp. 4.500.000,- = RT
	Jumlah = RT

K.1.3. Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan
1.	Nama Instansi/Dinas :
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi :
3.	Alamat Kantor :
4.	Alamat E-mail :
5.	Alamat website/situs :
6.	No. Telepon :
7.	No. Fax :

K.1.4. Stakeholder Pembangunan Perumahan dan Permukiman

a. Pengembang/Developer Terdaftar

No.	Pengembang	Jumlah	Jumlah Anggota (bila berbentuk asosiasi/organisasi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perum Perumnas		
2.	REI		
3.	APERSI		
dst	...		

b. Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Program/Kegiatan Bidang Perumahan

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah Anggota	Nama Program/Kegiatan Bidang Perumahan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paguyuban ...			
2.				
dst	...			

c. Lembaga Keuangan Bank/Non Bank/Mikro

No.	Nama Lembaga	Kategori Lembaga Gunakan (0)			Alamat Lengkap	No. Telp. /Fax.	Email	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan	Nilai Aset	Jumlah Nasabah/ Anggota
		Bank	Non Bank	Mikro							Rp	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.												
2.												
dst	...											

d. Perusahaan Penyelenggara Corporate Social Responsibility (CSR)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	No. Telp. /Fax.	Email	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status Perusahaan *)	Nilai Aset Rp	Jumlah Karyawan	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
dst	...									

*) Pilih salah satu: Lokal/Nasional/Internasional

...	Tahun CSR	Jumlah Alokasi CSR	Jumlah Rumah yang Difasilitasi
		Rp	unit
(10)	(11)	(12)	(13)

K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?
 a. Ada
 b. Dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
2. Jika mempunyai RUTR/ RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda (Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)?
 a. Benar
 b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk *hardcopy/softcopy* khusus bagian yang terkait perumahan saja)
 a. Ada
 b. Dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah)?
 a. Sudah
 b. Sedang dalam penyusunan
 c. Tidak tahu
 d. Tidak ada
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (*stakeholders*) pada sektor permukiman?
 a. Sudah
 b. Belum
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah ada permasalahan yang timbul?
 a. Ada
 b. Tidak ada
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
7. Jika ada, apa permasalahan tersebut?
 a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan dan permukiman
 b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait
 c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, bagi para *stakeholders*
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, apakah Kabupaten/Kota sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan?
 a. Sudah
 b. Belum
 c. Tidak tahu
 d. Lainnya (tuliskan) : ...

9. Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan zona permukiman/ perumahan yang telah ada pada RTRW Kabupaten/Kota?
- a. Sudah c. Tidak tahu
 b. Belum d. Lainnya (tuliskan) : ...
10. Jika belum sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan dan permukiman yang tertuang pada RTRW
 b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman
 c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi yang semakin meningkat
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan
 b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi *backlog*
 c. Semua jawaban benar
 d. Lainnya (tuliskan) : ...
12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota memanfaatkan sumber dana yang berasal dari:
- a. APBD c. Swadaya
 b. *Loan* (pinjaman) dari badan/bank luar negeri d. Swasta
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah telah dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengetahui kebutuhan akan perumahan?
- a. Sudah d. Tidak tahu
 b. Sedang dilakukan survai e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Belum
14. Apakah Kabupaten/Kota sudah mempunyai lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?
- a. Ada c. Tidak tahu
 b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) : ...
15. Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?
- Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- a. Melakukan perubahan fungsi lahan d. Semua jawaban benar
 b. Melakukan pembelian lahan e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Melakukan *ruislag* (tukar guling) lahan

17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Baik d. Tidak tahu
 b. Cukup e. Lainnya (tuliskan) : ...
 c. Sangat kurang
18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait
 b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur
 c. Kawasan perumahan dan permukiman terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, bentuk ketidak-terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
- a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain
 b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir pada lokasi perumahan lain
 c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
- a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum
 b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana
 c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...
21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten/Kota, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?
- a. Sudah c. Tidak tahu
 b. Belum d. Lainnya (tuliskan) : ...
22. Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?
- a. Ada c. Tidak tahu
 b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) : ...
23. Jika ada, apa kendala tersebut?
- a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (*stakeholders*)
 b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana
 c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi
 d. Semua jawaban benar
 e. Lainnya (tuliskan) : ...